

Sandel, Krisis Demokrasi dan Tirani Meritokrasi¹

Otto Gusti Madung
Dosen STFK Ledalero, Maumere, Flores

Pendahuluan

Dalam presentasi ini saya akan coba memaparkan pemikiran Michael Sandel dalam karyanya berjudul *The Tyranny of Merit* atau “Tirani Meritokrasi”. Buku ini terbit pada bulan September 2020 yang lalu. Akan tetapi Michael Sandel dalam diskursus filosofis tergolong dalam kelompok pemikir yang menyandang nama komunitariaansime. Karena itu sebelum membahas tentang tesis dasar Michael Sandel dalam karya *The Tyranny of Merit*, saya akan memaparkan secara singkat tentang konsep komunitarianisme.

Dalam karya tersebut Michael Sandel menunjukkan bahwa krisis demokrasi liberal yang terperangkap dalam demokrasi teknokratis telah memicu lahirnya populisme di sejumlah negara di dunia. Akar dari krisis tersebut adalah tirani meritokrasi. Meritokrasi adalah sebuah ideologi yang mendefinisikan prestasi individu sebagai kriteria satu-satunya yang menentukan status dan posisi sosial seseorang. Karena itu sebelum pembahasan tentang tirani meritokrasi, saya akan mengemukakan sejumlah fenomena krisis demokrasi.

Pengetian Komunitarianisme

Komunitarianisme dapat dimengerti sebagai sebuah ikhtiar untuk menghidupkan kembali pada era postmodern ini sebuah kesadaran kolektif atau kesadaran akan hidup dalam komunitas di tengah kondisi masyarakat informasi. Definisi singkat ini mengungkapkan secara kasat mata ambivalensi komunitarianisme. Ambivalensi karena di tengah kondisi masyarakat modern yang ditandai dengan liberalisme dan

¹ Dipresentasikan pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Acara Webinar Filsafat yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) Jakarta.

individualisme, model-model kehidupan komunitas justru menawarkan kepada manusia cara-cara hidup tradisional agar merasa *at home*. Lebih jauh, cara hidup komunitas itu di satu sisi lahir sebagai kritik atas masyarakat liberal yang individualistis, namun di sisi lain muncul dalam wajah fundamentalisme neototalitarian. Di sini kita lihat bahwa diskursus tentang komunitarisme bergerak dalam ketegangan antara modernitas dan konservativisme.²

Sebagai sebuah mazhab filsafat, komunitarisme lahir sebagai produk sekelompok pemikir anglosaxon yang mengkritisi konsep kontrak sosial seperti dikembangkan John Rawls dan liberalisme pada umumnya. Perdebatan liberalisme versus komunitarisme dimulai awal tahun 80-an dan berkembang begitu cepat.³ Komunitarisme terdiri dari macam-macam posisi berbeda, namun mereka sepakat pada beberapa hal mendasar berikut ini.

Pertama, Komunitarianisme sebagai Kritik atas Liberalisme

Fase pertama pemikiran komunitarian lahir di USA pada tahun 80-an sebagai kritik terhadap apa yang oleh Charles Taylor, Michael Sandel dan sejumlah yang lain namakan sebagai “individualisme atomistik” teori kontrak sosial liberal. Sebagai antitesis, para pemikir komunitarian berpandangan bahwa individu atau manusia liberal modern hanya mungkin dapat bertumbuh di dalam sebuah jaringan sosial. Sebaliknya penekanan hanya pada landasan atau tuntutan hak individu akhirnya menghantar manusia menuju kehancuran jaringan sosial tersebut dan juga prasyarat integrasi sosial.

Karena itu komunitarisme menganggap penting adanya tuntutan untuk menjadi anggota komunitas atau “obligation to belong” yang harus dikembangkan dan dibentuk oleh setiap individu atas dasar refleksinya terhadap relasi atau jaringan sosial. Paradigma berpikir komunitarian mendefinisikan dirinya sebagai koreksi niscaya terhadap individualisme liberal. Karena itu komunitarisme tidak berpretensi menyingkirkan atau membatalkan liberalisme, melainkan lebih memakainya dalam proses refleksi diri menuju *insight* tentang prasyarat yang memungkinkannya. Seruan

² Bdk. Walter Reese-Schäfer, *Komunitarismus* (Frankfurt am Main: Campus Verlag, 2001), hlm. 7.

³ Bdk. Stephen Cowden and Gurnam Singh, “Community cohesion, communitarianism and neoliberalism”, dalam: *Critical Social Policy*, 2017, Vol. 37 (2), hlm. 268-286 <<https://doi.org/10.1177/0261018316670252>>

akan kemendesakan refleksi diri dan kejernihan pikiran tersebut membedakan komunitarianisme modern yang responsif dari paradigma berpikir kolektif tradisional yang berorientasi pada asal-usul kesamaan etnis dan budaya.

Kedua, Komunitarianisme sebagai Aktivisme Politik

Pada tahun 1990-an sejumlah cendekiawan memutuskan untuk menghantar ide politik intelektual ke jalanan. Dalam bahasa Amitai Etzioni: "We have to carry these ideas to the street". Kelompok ini dipimpin oleh Amitai Etzioni sendiri dan William Galtson. Mereka dikenal dengan nama *New Communitarians*. Kelompok ini menandai lahirnya fase kedua komunitarianisme yang dikenal dengan fase aktivisme politik.

Mereka berpandangan bahwa kritik atas liberalisme oleh kubu komunitarian pada tahun 80-an gagal melihat aspek represif, paternalistik dan otoritarian dari kehidupan komunitas yang dapat menindas individu. Mereka gagal melihat bahaya komunitas yang sudah diingatkan oleh George Orwell dalam utopia negatifnya pada tahun 1984. Mereka juga tidak berpikir tentang totalitarianisme kiri atau kanan, fundamentalisme agama dan sejumlah kolektivisme totalitarian seperti yang dijumpai di Asia. Semua fenomena ini harus direfleksikan dan diungkapkan ke publik ketika terlibat aktif dalam diskursus politik publik.

Ketiga, Reakademisasi dan Liberalisme Komunitarian

Anjuran reakademisasi atas pemikiran komunitarian dikemukakan oleh Amitai Etzioni pada tahun 1997. Alasannya, aktivisme politik dianggap berhasil dan telah mencapai tujuan. Dalam kunjungan ke beberapa negara, Amitai Etzioni mendapat sejumlah pertanyaan teoritis yang membutuhkan jawaban pada tataran akademis.

Di negara-negara Asia Amitai Etzioni menjumpai sejumlah persoalan seputar pendasaran nilai dan validitas universal nilai-nilai moral dalam hubungan dengan relativisme moral. Etzioni menolak relativisme moral. Akan tetapi apa solusinya? Model khas komunitarian adalah dialog moral dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Akan tetapi bahayanya ialah bahwa model ini mengutamakan kompromi nilai yang rapuh ketimbang menemukan norma moral yang valid. Maka sebagai jalan keluar yang terakhir ialah menggunakan metode intuisi yang eviden dari dirinya sendiri. Etzione berpendapat bahwa intuisi moral merupakan jalan keluar terakhir sekurang-kurangnya pada pengambilan keputusan berdasarkan suara hati, kendatipun suara hati tidak

bebas dari kekeliruan dan tipuan. Pendasaran filosofis terakhir dianggap gagal hingga kini. Untuk itu kita perlu menemukan solusi yang secara pragmatis berfungsi dengan baik. Reakademisasi komunitarian pada tempat *pertama* dapat dipahami sebagai seruan untuk mencurahkan lebih banyak energi guna melakukan riset dalam menjawab pertanyaan ini. Aspek *kedua* dari proses reakademisasi adalah observasi ilmiah atas dampak politik praktis dari penerapan model-model komunitarian. Tugas *ketiga* adalah rekonstruksi dan refleksi kritis atas sejarah pemikiran komunitarian. Salah satu kritikan terhadap komunitarianisme ialah kedekatannya terhadap ideologi totalitarian. Kritik ini antara lain dapat ditanggapi dengan sangat baik dari perspektif komunitarian liberal seperti sudah diuraikan pada bagian terdahulu.

Perdebatan antara liberalisme versus komunitarianisme pernah menjadi bahan diskusi yang sangat digandrungi di banyak universitas dan forum ilmiah pada awal tahun 1990-an. Antagonisme tersebut kini sudah lenyap. Etzioni misalnya menyebut dirinya sebagai seorang liberal komunitarian, sementara yang lainnya membaptis diri menjadi komunitarian liberal. Dewasa ini pemikiran berbasis komunitas dipandang sebagai penyempurnaan terhadap politik liberal.

Krisis Demokrasi

Kritik Sandel atas konsep *unencumbered self* adalah penolakan atas basis antropologis yang melandasi bangunan demokrasi liberal. Basis antropologis ini rapuh dan tidak mampu menciptakan solidaritas kolektif di atasnya konstruksi demokrasi dapat dibangun. Akibatnya terjadi krisis demokrasi liberal seperti yang dialami dewasa ini.

Lebih lanjut Sandel berpandangan bahwa konsep liberal tentang pribadi atau individu tidak dapat diberi pendasaran rasional. Alasannya, liberalisme menjalin relasi parasit dengan gambaran tentang komunitas yang tidak diakuinya secara formal.⁴ Menurut Sandel, persoalan fundamental liberalisme ialah harus berpijak pada pandangan tentang komunitas (*Gemeinschaft*) yang tidak diakuinya dan bahkan dihancurkannya.⁵ Ini berkaitan dengan pertanyaan dasar politik tentang kesatuan yang mendasari perasaan kolektif dan kewajiban atau tanggung jawab sosial. Menurut Sandel, dalam masyarakat Eropa dan Amerika cukup lama berkembang keyakinan bahwa bentuk

⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

⁵ *Ibid.*

perasaan kesatuan sebagai komunitas nasional kokoh harus didorong lewat pendidikan politik dan kegiatan-kegiatan publik lainnya. Dalam diskursus akademik di USA orang berbicara tentang “republik nasional” di mana *virtues of citizens* dan patriotisme memainkan peran sentral. Akan tetapi menurut Sandel, Amerika terlalu luas dan heterogen secara kultural, sehingga sulit untuk membangun kesadaran kolektif mendalam sebagai sebuah bangsa. Akibatnya, tunduk di bawah logika liberalisme, konsep tentang tujuan bersama dan kebaikan kolektif diganti dengan “prosedur yang fair”. Di sini negara dimengerti sebagai “*procedural republic*”.⁶

Dalam republik prosedural, kebebasan dipahami sebagai antitesis dari demokrasi. Kebebasan dilihat sebagai perisai pelindung individu dari kemungkinan gempuran mayoritas.⁷ Hal ini berseberangan dengan pandangan republikanisme tradisional. Dalam republikanisme tradisional kebebasan dihayati sebagai musyawarah dan aksi bersama warga. Namun lewat proses modernisasi dan sentralisasi institusi demokrasi (partai dan parlemen), kekuasaan terkonsentrasi pada lembaga-lembaga seperti birokrasi dan pengadilan yang sengaja diciptakan untuk mendistribusikan dan melindungi hak-hak individual.⁸ Namun di sisi lain pada saat yang sama *welfare state* menuntut keterlibatan dan komitmen warga negara untuk meringankan beban finansial satu sama lain. Satu konsep tentang diri yang pada akhirnya berlandaskan pada *hak* individual, tidak cukup untuk memberikan basis legitimasi untuk tuntutan komitmen dan keterlibatan warga dalam *welfare state* di atas. Persoalan ini menurut Sandel bermuara pada perasaan ketakberdayaan warga negara di hadapan raksasa birokrasi atau *big government*. Benar bahwa hak-hak individu diperkuat lewat proses pemilihan umum dan lembaga peradilan termasuk mahkamah konstitusi. Akan tetapi perasaan ketakberdayaan warga tetap saja ada. Negara terkesan semakin *omni potent*, namun di sisi lain tidak berdaya berhadapan dengan kekuasaan korporasi.

Menurut Sandel, *unencumbered self* dari teori liberal telah menjadi kenyataan. Namun dia tidak tampil sebagai individu yang bebas, melainkan sebagai figur yang telah

⁶Axel Honneth (Hg.), *Kommunitarismus. Eine Debatte über die moralischen Grundlagen moderner Gesellschaften* (Frankfurt am Main: Campus Verlag, 1993).

⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

⁸ *Ibid.*, hlm. 34.

dilucuti otonominya, terperangkap dalam jaringan kewajiban dan sistem tanpa keputusan bebasnya. Di samping itu dalam politik tidak ditemukan identifikasi komunitas atau identitas kolektif yang mampu menopang kehidupan individu.

Dilema emansipasi individu di satu sisi dan pelucutan otonomi warga negara yang diakibatkan oleh proses emansipasi tersebut terungkap dalam ketakberdayaan warga negara di hadapan birokrasi raksasa negara. Hal ini telah mendatangkan krisis demokrasi yang ditandai dengan menguatnya gelombang populisme kanan seperti diilustrasikan oleh fenomena *Brexit* dan bertahannya Donald Trump hingga akhir masa jabatannya. Warga negara yang terpinggirkan dan dibuat tidak berdaya dalam proses demokrasi liberal akhirnya menemukan jawaban akan kekecewaannya dalam retorika anti elitis para pemimpin populis. Akibatnya, negara-negara seperti Hungaria, Turki, Rusia dan Polandia yang pernah menjanjikan harapan bagi demokrasi perlahan-lahan berkembang menjadi otoritarian dan menampilkan wajah populisme kanan.

Tirani Meritokrasi

Menurut Michael Sandel krisis demokrasi kontemporer berakar pada ideologi meritokrasi. Dalam kata-kata Sandel sendiri: "*The populist backlash has been a revolt against the tyranny of merit*"- "Serangan populisme adalah pemberontakan melawan tirani meritokrasi".⁹ Tirani itu dialami oleh kelompok pekerja yang merasa direndahkan oleh sistem meritokrasi dan seluruh proyek politik liberal.¹⁰ Sandel menggambarkan bagaimana prinsip meritokrasi menghancurkan sistem demokrasi. Meritokrasi adalah sebuah masyarakat yang menjadikan prestasi individu sebagai ukuran satu-satunya dalam kehidupan sosial serta memandang tinggi rendahnya status atau peringkat sosial atas dasar prestasi tersebut.

Dalam karya ini Sandel ingin menunjukkan bahwa ada semacam dugaan atau ideologi dalam arti kesadara palsu yang menyatakan seolah-olah kita hidup dalam masyarakat meritokratis atau berbasis prestasi. Ideologi ini memiliki dampak luar biasa bagi

⁹ Julian Coman, "Michael Sandel: 'The populist backlash has been a revolt against the tyranny of merit'." *The Guardian*, 6 September 2020 <https://www.theguardian.com/books/2020/sep/06/michael-sandel-the-populist-backlash-has-been-a-revolt-against-the-tyranny-of-merit?fbclid=IwAR3dwC5mJRR7eZbXywhZ462C1Ai253LXQxTaMz7qTCdbw-oDRFjxLC_djAI>

¹⁰ Bdk. Stephen Cowden and Gurnam Singh, *op.cit.*, hlm. 272

masyarakat seperti ditunjukkannya dalam analisis tentang masyarakat Amerika Serikat. Pandangan yang menyatakan bahwa prestasi individu adalah kriteria satu-satunya, bahwa prestasi sosial, pendapatan dan kesejahteraan ditentukan oleh prestasi masing-masing individu, telah menghancurkan solidaritas sosial dan menguburkan mimpi tentang kesejahteraan sosial. Michael Sandel berpandangan bahwa ideologi meritokrasi pada tahun 2016 telah menghantar Donald Trump ke Gedung Putih.¹¹

Mayoritas buruh tanpa ijazah universitas telah memilih Donald Trump pada pemilihan umum tahun 2016. Politik kebencian dan kemarahan yang diusung oleh Donald Trump telah menarik perhatian dan simpati kelompok buruh. Hal ini bisa dijelaskan lewat kondisi ekonomi mereka yang semakin buruk dalam empat dekade terakhir. Pada tahun 1971 93% dari kelompok buruh berkulit putih memiliki pekerjaan yang baik. Sementara pada tahun 2016 tinggal 80% yang memiliki lapangan pekerjaan.¹² Di samping itu, pada tahun 2017 orang Amerika tanpa ijazah perguruan tinggi yang bekerja hanya 68%. Dari 20% yang menganggur, hanya sedikit yang memiliki optimisme untuk mencari pekerjaan. Mayoritas dari mereka sudah putus asa dan merasa bahwa ekonomi pasar global telah menghancurkan masa depan mereka. Kehilangan harapan untuk mencari lapangan pekerjaan baru ini bukan saja ungkapan patologis dari sebuah moralitas yang ambruk. Tak sedikit orang melakukan bunuh diri karena putus asa. Sandel menyebutnya “Todesfälle aus Verzweiflung” – “Kematian karena kehilangan harapan”.¹³

Sandel bekerja sebagai profesor pada Harvard University. Ia mengamati perkembangan sosial yang dramatis dan mengetahui dengan pasti bagaimana para mahasiswa menggantungkan kemampuan prestasinya pada simbol “telah menamatkan studi pada *elite universities*” seperti Harvard dll. Sementara itu di sisi lain, demikian Sandel, tiket masuk ke universitas-universitas papan atas itu sangat bergantung pada kekayaan orang tua mereka. Dengan memberikan penekanan pada prestasi (*merit*) tampaknya kecenderungan umum masyarakat Amerika Serikat yang dalam empat dekade terakhir

¹¹ Michael Sandel, *Vom Ende des Gemeinwohls. Wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreisst* (Berlin: Fischer Verlag, 2020), hlm. 10

¹² Ibid., hlm. 316

¹³ Ibid., hlm. 317

telah menjadikan prestasi sebagai episentrum gambaran dirinya. Para mahasiswa menafsirkan posisi mereka di tengah masyarakat seperti yang disuguhkan oleh *Zeitgeist* tersebut. Menurut Sandel, *Zeitgeist* itu muncul dalam wajah neoliberalisme pada masa pemerintahan Ronald Reagan pada tahun 80-an. Akan tetapi *Zeitgeist* itu baru berkembang menjadi hegemonial berkat jasa dari para petinggi partai demokrat seperti Bill dan Hilary Clinton serta Barack Obama.

Di sini Sandel menampilkan argumentasi pokoknya. Ia menunjukkan kepada para elit partai demokrat serta mengkonfrontasi mereka dengan pengetahuan baru bahwa mereka telah berjasa dan bertanggung jawab menghantar seorang presiden seperti Donald Trump ke puncak kekuasaan politik Amerika Serikat. Karena itu terlalu mudah untuk marah dan kecewa dengan Trump, tanpa merefleksikan peran partai demokrat yang telah menciptakan kondisi sosial yang memuluskan jalan bagi Donald Trump. Ketika Donald Trump memenangkan pemilu pada tahun 2016, para pakar dan politisi *mainstream* sangat terkejut dan kehilangan akal. Alasannya, mereka buta terhadap budaya elitis yang menganggap rendah kelompok buruh yang berlangsung empat dekade terakhir. Kultur ini lahir dari projek meritokrasi yang bersifat eksklusif dan timpang serta digerakkan oleh globalisasi kapitalisme pasar.

Sandel menunjukkan sejumlah aspek ideologis dari praktik meritokrasi. *Pertama*, berkaitan dengan cara menghadapi persoalan ketimpangan sosial. Dalam kaca mata paradigma meritokrasi, penjelasan untuk persoalan ketimpangan sosial sangat sederhana, yakni karena ada orang menghasilkan banyak, dan yang lainnya sedikit. Sandel memperkuat kritiknya dengan mengangkat sejumlah pernyataan publik dari sejumlah politisi partai demokrat yang jelas-jelas mendukung ideologi meritokrasi. Hillary Clinton misalnya merelativisasi kekalahannya pada tahun 2016 dengan mengatakan bahwa dia dipilih oleh warga Amerika Serikat yang menyumbangkan 80 % dari pendapatan bruto nasional.¹⁴ Dari perspektif meritokratis penjelasan ini masuk akal, tapi dia menghancurkan demokrasi sebab demokrasi tidak dibangun di atas prinsip prestasi tapi *one person one vote*.

¹⁴ Bdk. Ibid., hlm. 189

Kedua, tafsiran meritokratis atas penyebab munculnya ketimpangan sosial berdampak negatif bagi kelompok pinggiran. Tafsiran ini merendahkan dan menghina masyarakat miskin yang sudah berada pada posisi yang sangat sulit secara ekonomis. Meritokrasi berdampak negatif terhadap kelompok marginal sebab dibangun di atas ideologi: siapa yang miskin, jelas salah sendiri. Karena barang siapa bekerja keras, sudah pasti diganjar kesuksesan dalam hidup.¹⁵ Etika kesuksesan barbarian ini merasuki seluruh ranah kehidupan: yang berada pada puncak kesuksesan layak mendapatkan itu. Demikianpun yang gagal. Mereka gagal karena belum berjuang maksimal dan tidak memiliki pendidikan universitas.¹⁶

Ketiga, sistem pendidikan yang memperkuat ideologi meritokrasi. Sandel menunjukkan hasil pengamatannya tentang kehidupan universitas sehari-hari dan peluang di bidang pendidikan. Orang begitu yakin bahwa pendidikan merupakan solusi untuk mengatasi perangkap ketimpangan sosial. Sikap meritokratis tentang peran pendidikan ini juga ditekankan oleh sejumlah pejuang partai demokrat seperti Bill Clinton di Amerika Serikat, Tony Blair di Inggris dan Gerhard Schroeder di Jerman. Akan tetapi ironisnya, demikian Sandel, tiket masuk ke dunia pendidikan, terutama universitas, tidak ditentukan oleh prestasi individu anak didik, tapi oleh status ekonomi orang tua. Selain itu ketika konsentrasi pada pendidikan memperkuat pandangan tentang kompetisi di bursa pasar kerja, persaingan untuk mendapatkan tempat di universitas elite pun bertambah brutal.¹⁷

Keempat, sistem ekonomi merupakan sistem sosial yang paling dekat berkelindan dengan konsep meritokrasi. Pandangan *mainstream* mengatakan bahwa di bursa pasar kerja hanya orang berprestasi yang dapat bertahan. Di sini, Sandel mengajukan pertanyaan: apa persis yang dihasilkan oleh para banker atau komisaris BUMN yang dibayar dengan gaji paling tinggi? Jika gaji dibayar berdasarkan prestasi (*merit*), apa persis substansi dari prestasi tersebut? Mengapa seorang perawat yang mengorbankan hidupnya untuk para pasien Covid-19 dibayar lebih rendah? Bukankah ini contoh bahwa prinsip meritokrasi tak lebih dari sebuah ideologi?

¹⁵ Bdk. Michael Sandel, *Ibid.*, hlm. 12

¹⁶ Bdk. Julian Coman, *op.cit.*

¹⁷ Bdk. Michael Sandel, *Vom Ende des Gemeinwohls, op.cit.*, hlm. 15 dst.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas, Sandel menganjurkan sejumlah solisi. *Pertama*, Michael Sandel menganjurkan perlunya revitalisasi *public discourse*.¹⁸ Revitalisasi diskursus publik menuntut peninjauan kembali secara kritis atas premis dasar liberalisme yakni *the principle of avoidance* (prinsip penghindaran). Guna menciptakan masyarakat yang toleran liberalisme menempatkan keyakinan moral dan spiritual warga di ruang privat ketika mereka memasuki ruang publik. Tujuannya agar kelompok mayoritas tidak memaksakan nilai-nilai moralnya kepada kelompok minoritas serta mencegah pertarungan moral dalam politik berkembang menjadi perang antaragama. Di samping itu, prinsip penghindaran liberalisme berikhtiar untuk menciptakan basis bagi sikap respek dan toleran dalam sebuah tatanan sosial.

Akan tetapi menurut Sandel, strategi penghindaran yang dikembangkan oleh liberalisme keliru dan telah menciptakan krisis demokrasi. Prinsip netralitas negara dalam diskursus tentang konsep hidup baik (*good life*) menyebabkan liberalisme tidak mampu merespons isu-isu moral dan kultural yang telah menjadi alasan munculnya politik populisme. Liberalisme misalnya tidak dapat bicara tentang makna pekerjaan dan fungsi kerja untuk harga diri seseorang jika tidak masuk ke dalam perdebatan tentang kontestasi pelbagai konsep hidup baik. Atau, demikian Sandel, bagaimana liberalisme dapat bicara tentang relasi antara identitas nasional dan global jika tidak memiliki kosa kata tentang keutamaan-keutamaan yang mengungkapkan identitas tersebut serta klaim-klaim yang diciptakannya tentang kita?

Ketika liberalisme menerjemahkan makna, identitas dan tujuan menjadi pertanyaan seputar *fairness*, ia tidak mampu menangkap frustrasi dan kemarahan yang telah memicu lahirnya protes populisme. Liberalisme ketiadaan *ressources* moral, retorik dan empatik untuk memahami alienasi kultural dan degradasi yang dialami oleh kelompok buruh dan kelas menengah yang terpinggirkan dalam proses demokratisasi teknokratik. Liberalisme juga mengabaikan arogansi meritokratis kelompok elit. Frustrasi dan kemarahan ini ditangkap oleh para pemimpin populis seperti Donald Trump dan mengeskploitasinya untuk kepentingan agenda politik elektoral.

¹⁸ Michael Sandel, *Populism, Trump*, *op.cit.*

Liberalisme teknokratis yang menjauhkan diri dari perdebatan tentang konsep hidup baik telah mempermiskin diskursus di ruang publik, melumpuhkan daya kritis *ordinary citizens* dan memfasilitasi lahirnya populisme yang akhirnya mengisi ruang publik dengan wacana-wacana intoleran dan nasionalisme sempit penuh kebencian.¹⁹ Untuk keluar dari kondisi ini menurut Sandel, politik demokrasi perlu mengalami revitalisasi dengan membangun kembali diskursus publik yang kuat secara moral. Sebuah diskursus yang tetap menaruh penghargaan pada prinsip pluralisme dengan cara menghadapi secara aktif faktum disensus moral, dan bukan menghindarinya (*principle of avoidance*). Dengan demikian politik demokrasi dapat memahami kemarahan dan frustrasi kelompok masyarakat umum dan atas dasar itu membangun sebuah politik demokrasi baru yang lebih inklusif.

Kedua, untuk keluar dari masyarakat meritokrasi, Sandel membongkar asumsi-asumsi ideologi meritokrasi yang telah mempolarisasi masyarakat atas *winners* dan *losers*. Pandemi Covid-19 telah mengajarkan kita untuk mengapresiasi para pekerja yang dianggap tidak terampil dan karena itu dibayar murah. Inilah momen pembaharuan untuk mengevaluasi kembali martabat kerja. Pandemi ini menyadarkan kita bahwa hidup kita sangat bergantung pada pakerja murah seperti perawat, sopir truk, para pelayan di *supermarket*, pembantu rumah tangga, dan lain-lain.

Karena itu, Sandel menganjurkan perlunya reorientasi dalam memberi bobot pada pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan harus mampu menjamin hidup manusia yang bermartabat dan mendapatkan pengakuan secara sosial. Dengan ini Sandel tidak menganjurkan model egalitarianisme radikal, melainkan perlunya sistem *universal basic income*. Hal ini merupakan basis material dan sumber bagi terciptanya ikatan sosial dan solidaritas. Penilaian dan pemberian bobot pada model-model pendapatan perlu ditinjau kembali. Tarif pajak atas kerja harus diturunkan, sementara pajak atas pasar uang harus dinaikkan.

Ulasan tentang meritokrasi dapat dihubungkan dengan dua karakter fundamental pandangan sosial *mainstream* yakni individualisme dan pasar. Meritokrasi mendewakan

¹⁹ Michael Sandel, "Populism, liberalism and democracy", *op.cit.*, hlm. 355.

individu. Bukan kelompok atau komunitas (*Gemeinschaften*) menghasilkan sesuatu, melainkan individu. Individu harus diberi ruang untuk mengembangkan dirinya secara bebas dan untuk prestasinya itu ia perlu mendapatkan imbalan secukupnya. Akan tetapi paradigma berpikir seperti ini membahayakan semua jenis ikatan sosial. Pandangan tentang prestasi tanpa batas semuanya berputar sekitar individu dan mengabaikan sumber daya sosial yang menghidupi individu tersebut. Kreativitas dan terobosan alternatif di bidang politik, ekonomi dan budaya sangat dibutuhkan guna melawan hegemoni ideologi meritokrasi. Hal ini harus dimulai dengan menisbuhkan posisi individu dan mencari bentuk-bentuk ikatan sosial baru yang menjamin masa depan yang lebih baik.

Persoalan seputar pengakuan akan kerja berkelindan erat dengan tanggung jawab kita satu sama lain sebagai warga sebuah negara. Kita tidak dapat merumuskan kontribusi yang bermakna tanpa memikirkan tujuan dan arah kehidupan komunitas kita. Untuk itu dibutuhkan sebuah kesadaran kolektif, sebuah perasaan yang mewajibkan diri untuk bertanggungjawab terhadap satu sama lain sebagai warga dari sebuah komunitas. Menurut Sandel, kita harus merasa bahwa kita sedang berada “di atas perahu yang sama”.²⁰ Bukan sebuah rumusan seruan ritual yang baru muncul pada saat krisis pandemi Covid-19, tapi harus menjadi gambaran dari apa yang dialami setiap hari. Sandel berpandangan, jaringan global, aliran kapital dan identitas kosmopolitik telah merenggangkan relasi kita sebagai warga negara satu sama lain, kurang bersyukur terhadap hasil kerja sesama dan tidak terbuka terhadap tuntutan solidaritas. Melemahnya ikatan solidaritas ini, demikian Sandel, adalah akar dari polarisasi penuh kebencian yang melanda dunia politik kita. Guna menciptakan kembali martabat dari setiap pekerjaan, kita perlu memperbaiki relasi sosial kita sebagai sebuah komunitas politik.²¹

Penutup

²⁰ Michael Sandel, “Was unsere Arroganz anrichtet”, *Neue Züricher Zeitung am Sonntag*, 27. September 2020, hlm. 60.

²¹ *Ibid.*

Tulisan ini telah menunjukkan bahwa krisis demokrasi liberal yang terperangkap dalam demokrasi terknokratis telah memicu lahirnya populisme di sejumlah negara di dunia. Menurut Michael Sandel, akar dari krisis tersebut adalah tirani meritokrasi. Meritokrasi adalah sebuah ideologi yang mendefinisikan prestasi individu sebagai kriteria satu-satunya yang menentukan status dan posisi sosial seseorang. Ideologi meritokrasi telah meminggirkan kelompok kelas buruh dan kelas menengah dari seluruh proses demokrasi. Menurut Michael Sandel, kemarahan dan frustrasi dari kelas sosial ini telah menghantar Donald Trump ke gedung putih pada tahun 2016 lalu.

Untuk keluar dari persoalan ini, Sandel menganjurkan agar gambaran tentang prestasi individu dinisbikan dan mengangkat sumber daya sosial dan peran komunitas yang menghidupi individu tersebut. Lebih jauh, dari perspektif komunitarian Sandel mengkritik “prinsip penghindaran” liberalisme dan menekankan urgensi perdebatan tentang konsep hidup baik di ruang publik guna menjawab tantangan populisme kanan yang telah mengisi ruang publik dengan wacana intoleran, xenophobia dan nasionalisme sempit.

Pemikiran Sandel ini relevan untuk konteks Indonesia juga. Sejak reformasi bergulir bangsa Indonesia sudah mempraktikkan demokrasi liberal. Praktik ini perlu dipadukan secara kreatif dengan faham komunitarian. Budaya hak-hak asasi manusia yang sudah masuk dalam produk hukum bangsa Indonesia harus berjalan seiring dengan nilai-nilai komunitarian yang terkandung dalam agama-agama dan budaya-budaya lokal. Sebab, secara konkret individu tak pernah hidup sebagai *unencumbered self* atau individu tanpa komunitas. Selain solidaritas komunitarian yang berasal dari agama dan kebudayaan, bangsa Indonesia juga memiliki Pancasila. Pancasila adalah *locus* kontekstualisasi konsep universal hak asasi manusia di Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat. Pancasila juga mencegah bahaya privatisasi konsep hidup baik seperti dipraktikkan dalam masyarakat liberal.